1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Kota Prabumulih termasuk sebagai kota Non-IHK

   Indikator IPH (Indeks Perkembangan Harga)

   - IPH Kota Prabumulih Minggu Lima **Bulan Juli 2026 sebesar : -1.51**

     komoditas dengan andil terbesar yaitu :

     1. Cabai Merah (-0.8334) 2. Cabai Rawit (-0.4333), Bawang Merah (-0.2536).
   - IPH Kota Prabumulih Minggu ketiga **Bulan Agustus 2026 sebesar : 0.56**

     komoditas dengan andil terbesar yaitu :

     1. Daging Sapi (0,8972), 2. Daging Ayam Ras (0,4904), 3. Minyak Goreng (0,0644)
   - Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Keempat **Bulan September 2026 sebesar : 46**

     komoditas dengan andil terbesar yaitu :

     1. Cabai Merah (0,6821), 2. Beras (0,4442), 3.Cabai Rawit (0,3663)

     Komoditas utama penyumbang inflasi pada Triwulan 3 Tahun 2026 antara lain :

     Secara keseluruhan, komoditas pangan yang paling konsisten menjadi **motor penggerak inflasi utama** selama Triwulan III 2026 di Kota Prabumulih adalah **Cabai Merah, Daging Sapi, Beras, dan Daging Ayam Ras**. Kenaikan ini umumnya dipicu oleh pergeseran pasokan musiman serta biaya distribusi menjelang akhir tahun.

   Risiko Ke Depan

   - Potensi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem atau bencana alam (kebakaran lahan).
   - Gangguan cuaca atau pergeseran musim panen di wilayah penyuplai berpotensi memicu lonjakan harga yang lebih ekstrem menjelang akhir tahun.
   - Jika pasokan dari daerah lumbung padi (seperti wilayah Ogan Ilir atau Banyuasin) terganggu akibat siklus tanam atau kendala distribusi, harga beras akan terus menekan daya beli masyarakat karena sifatnya yang tidak tergantikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   1. Tingginya Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah (Net Importer)

   Kota Prabumulih bukan merupakan daerah sentra produksi utama untuk komoditas pangan pokok tertentu. Akibatnya, jalur distribusi dan ketersediaan stok sangat rentan terhadap kondisi daerah penyuplai.

   Masalah : Lonjakan harga daging sapi (0.8972) dan daging ayam ras (0.4904) pada bulan Agustus menunjukkan bahwa pasokan protein hewani lokal belum mandiri dan

sangat bergantung pada pasokan luar daerah seperti Lampung atau wilayah estimasi penyuplai lainnya.

2. Volatilitas Ekstrem Komoditas Hortikultura

Komoditas hortikultura di Prabumulih memiliki fluktuasi harga yang sangat tajam dan sulit diprediksi dalam jangka pendek.

Masalah : Terjadi pembalikan tren (*price reversal*) yang ekstrem pada cabai merah dan cabai rawit. Pada akhir Juli, komoditas ini jatuh dan memicu deflasi dalam (-0.8334 dan -0.4333), namun di akhir September justru melonjak tajam dan menjadi penyumbang utama inflasi (0.6821 dan 0.3663). Hal ini mengindikasikan lemahnya manajemen pola tanam lokal atau tidak adanya sistem penyangga stok (*buffer stock*) saat panen melimpah.

3. Tekanan Struktural pada Komoditas Beras

Beras merupakan bahan pokok utama yang memiliki andil inflasi persisten dan berdampak langsung pada garis kemiskinan.

Masalah : Munculnya beras sebagai penyumbang inflasi signifikan pada bulan September (0.4442) menunjukkan adanya kendala pada rantai pasok, baik dari sisi penurunan hasil panen regional (akibat faktor cuaca/musim) maupun peningkatan biaya giling dan distribusi.

4. Efektivitas Intervensi Pasar yang Belum Menyeluruh

Meskipun Pemerintah Kota Prabumulih rutin mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Operasi Pasar, intervensi ini terkadang bersifat temporer.

Masalah : Operasi pasar sering kali baru responsif setelah harga melonjak di pasar tradisional, belum sepenuhnya berbasis *early warning system* (sistem peringatan dini) yang mampu meredam gejolak harga sebelum andil inflasi telanjur membesar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Implementasi program kerja mengacu pada strategi **4K,** dengan rincian aksi sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat secara langsung terhadap komoditas yang bergejolak (*volatile foods*) :

Gerakan Pangan Murah (GPM) & Operasi Pasar Murah : Pemkot Prabumulih (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) secara rutin menggelar pasar murah di tingkat kelurahan/kecamatan, khususnya menyediakan **beras SPHP Bulog**, **minyak goreng**, **telur, bawang, cabe dan gula** dengan harga di bawah harga pasar, pelaksanaan Pasar murah dan Pangan murah triwulan III sebanyak 5 kali.

Melaksanakan Sidak Pasar : Satgas Pangan, di Pimpin langsung oleh Asisten II Bapak Wawan Gunawan AK.,CA di dampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Titing, SP Bersama TIM Satgas Pangan Dalam Rangka melaksanakan Operasi Pasar TIM Satgas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Prabumulih mengantisipasi kelangkaan Stok dan kenaikan Harga Pangan Pokok Tahun 2026, Stok Pangan cukup dan aman. (Jum'at, 28 Agustus 2026)

Melaksanakan pemantauan harga dan stok : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Titing, SP didampingi oleh Kanit II RESKRIM POLRES Prabumulih Ipda Fajirudin, S.I.P bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih yang diwakili oleh Kabid Perdagangan Ibu Retno Kustiawati, SE telah menindaklanjuti dari laporan Satgas Pengawasan Beras per tanggal 21 September 2026 pada Kota Prabumulih di Toko Satria di PTM Prabumulih terdapat kekosongan stok beras SPHP.

2. Ketersediaan Pasokan

Kebijakan diarahkan pada penguatan stok pangan di tingkat lokal agar tidak 100% bergantung pada daerah luar:

Gerakan Tanam (Gertam): Menggerakkan pekarangan pangan lestari (P2L) dan mewajibkan ASN serta kelompok wanita tani (KWT) menanam cabai secara mandiri. Langkah ini efektif meredam volatilitas ekstrem harga cabai merah dan cabai rawit seperti yang terjadi pada bulan September.

Penanaman bibit kelapa sawit : Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Program Tebang Tebas yang digelar di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Program Tebang Tebas dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota Prabumulih untuk mendorong sektor pertanian agar semakin berkembang dan menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Pembukaan program tersebut diawali dengan penanaman bibit kelapa sawit secara simbolis oleh Wali Kota Prabumulih sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Penyaluran Bantuan Sosial Pangan : Mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meredam andil inflasi beras yang tinggi penyaluran beras tahap II Juli s.d September sebanyak 21.417 KPM dengan beras 642,51 Ton .

3. Kelancaran Distribusi

Kebijakan ditujukan untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menekan biaya logistik:

Pengawasan Jalur Distribusi Pangan: Tim Satgas Pangan Polres Prabumulih bersama dinas terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor dan agen minyak goreng/beras untuk mencegah praktik penimbunan (*hoarding*).

4. Komunikasi Efektif

Kebijakan difokuskan pada manajemen ekspektasi masyarakat dan validasi data:

Pemantauan Harga Real-Time (SP2KP) : Melakukan pencatatan harga harian di pasar utama untuk menghasilkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan yang akurat sebagai basis pengambilan kebijakan cepat (*early warning system*).

Edukasi Belanja Bijak : Mengimbau masyarakat melalui media lokal agar tidak melakukan *panic buying* saat terjadi lonjakan harga daging atau cabai, guna menjaga stabilitas psikologis pasar.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 : Rapat koordinasi Inflasi juga membahas kenaikan bahan pangan, Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah bisa menekan kenaikan inflasi yang akan terjadi disetiap Daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang **Triwulan III 2026**, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Prabumulih bergerak fluktuatif dengan tren meningkat tajam di akhir triwulan : **-1.51 (Juli) → 0.56 (Agustus) → 1.46 (September)**. Kebijakan pengendalian inflasi melalui strategi **4K** telah berjalan, namun efektivitasnya terganjal oleh tingginya ketergantungan pasokan luar daerah dan perubahan musim.

Keterjangkauan Harga

Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Beras SPHP sukses meredam interaksi psikologis pasar sehingga mencegah aksi borong (panic buying).

Intervensi pasar masih bersifat reaktif, di mana pergerakan masif baru berjalan setelah terjadi lonjakan harga yang signifikan pada bulan September.

Ketersediaan Pasokan

Stok pangan khususnya komoditas beras berada dalam kondisi relatif aman berkat dukungan kemitraan regional dengan wilayah Sumatera Selatan.

Kelancaran Distribusi

Satgas Pangan bergerak aktif dan konsisten dalam melakukan pengawasan langsung ke gudang-gudang agen beras dan minyak goreng.

Komunikasi Efektif

Pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) dilakukan secara mingguan dan konsisten sebagai basis pengambilan kebijakan.

Daerah masih kekurangan sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi untuk mendeteksi potensi gagal panen sejak dini.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Transformasi GPM :** Mengubah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dari

jadwal tentatif menjadi jadwal permanen yang berfokus pada titik rawan pangan.

2. **Aktivasi KAD Khusus Peternakan :** Segera mengonkritkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan daerah sentra peternakan sapi dan ayam pedaging untuk mengamankan stok menghadapi libur akhir tahun.
3. **Optimalisasi BTT untuk Logistik :** Mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat untuk mensubsidi transportasi angkutan cabai jika jalur pasokan Sumatera bagian selatan kembali terganggu cuaca buruk.
4. **Pengembangan *Early Warning System* (EWS) Inflasi :** Mengintegrasikan data harian harga pasar dari Dinas Perdagangan ke dalam sistem peringatan dini berbasis IPH, sehingga TPID dapat mengambil tindakan intervensi 2 minggu sebelum komoditas tersebut menyumbang andil inflasi tinggi.
5. **Kampanye Diversifikasi Pangan dan Belanja Bijak :** Mengedukasi masyarakat melalui media sosial pemerintah dan radio lokal untuk beralih ke konsumsi daging ayam beku (jika daging segar mahal) serta menahan diri dari perilaku *panic buying*.